

## **Analisis *Value For Money* Pada Kinerja Program Kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe**

### *Value For Money Analysis on the Performance of Activity Programs at the Regional Finance and Revenue Management Agency of the Sangihe Islands Regency*

**Sicillia Ambat<sup>1</sup>, Hendrik Manossoh<sup>2</sup>, Lady Diana Latjandu<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,  
Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email : [sicillia21@gmail.com](mailto:sicillia21@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstrak:** Otonomi daerah mengacu pada hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kegiatan pemerintahan dan kepentingan umum sesuai dengan undang-undang. Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari efisiensi pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mengelola keuangan dengan menggunakan analisis *Value for Money* yang terdiri atas ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tergolong baik. Karena, berdasarkan hasil analisis *Value for Money* pada Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan program kegiatan tahun 2021 di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan rasio ekonomi yang di hitung nilai sebesar 90% yang termasuk dalam kategori ekonomis. Dari segi efisiensi memiliki nilai rasio efisien sebesar 109% yang termasuk dalam kategori efisien. Dan dari segi efektivitas, nilai rasio efektivitas yang diperoleh yaitu sebesar 102% dimana hal ini termasuk dalam kategori efektif.

**Kata Kunci:** *Value for Money, Kinerja, Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas.*

**Abstract:** Regional autonomy refers to the rights, authorities, and obligations of autonomous regions to regulate and manage their own government activities and public interests in accordance with the law. The success of regional autonomy cannot be separated from the efficiency of the government in managing regional finances. This study aims to determine the ability of the local government of the Sangihe Islands Regency in managing finances using Value for Money analysis which consists of economy, efficiency, and effectiveness. The analytical method used in this research is descriptive qualitative. The results showed that the performance of the Regional Finance and Revenue Management Agency of the Sangihe Islands Regency was classified as good. Because, based on the results of the Value for Money analysis in the Physical and Financial Realization Report of the 2021 activity program at the Regional Finance and Revenue Management Agency of the Sangihe Islands Regency with an economic ratio calculated the value of 90% which is included in the economic category. In terms of efficiency, it has an efficient ratio value of 109% which is included in the efficient category. And in terms of effectiveness, the value of the effectiveness ratio obtained is 102% where this is included in the effective category.

**Keywords:** *Value for Money, Performance, Economy, Efficiency, and Effectiveness.*

## **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah mengacu pada hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kegiatan pemerintahan dan kepentingan umum sesuai dengan undang-undang. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan tingkat pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pengelolaan sumber daya daerah secara lebih efisien dan efektif. Otonomi daerah pada hakekatnya

Diterima: 20-09-2022; Disetujui untuk Publikasi: 09-10-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

berupaya memberikan ruang dan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri agar dapat bersaing dan berkolaborasi dengan para ahli, terutama dalam mengimplementasikan dan mengelola sumber daya dan potensi daerah (Jamaluddin, 2019). Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari efisiensi pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas pembangunan. Tujuan APBD adalah digunakan untuk mendanai infrastruktur dan fasilitas daerah, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran untuk pertumbuhan ekonomi dan manfaat umum.

Masalah yang sering terjadi dalam pelaksanaan APBD adalah penggunaan anggaran yang terbuang percuma dan tentunya tidak sesuai peruntukannya sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai contoh, pembangunan pelabuhan dermaga mini pelabuhan tua (Peltu) Tahuna, akhir tahun 2015 langsung disusul pula dengan pembangunan jeti apung dilokasi yang sama. Dilansir dari *suarasulutnews.co.id*, menurut Ferdy Sinedu ST selaku anggota DPRD Sangihe menilai proyek dermaga mini berbadrol Rp 9 miliar lebih yang dibangun akhir tahun 2014 serta proyek jeti apung Rp 7 miliar lebih, merupakan proyek tumpang tindih yang tak jelas pemanfaatannya. "Kami melihat proyek jeti apung dan dermaga mini tumpang tindih, sebab manfaat dermaga mini yang setahun ini tak jelas, tiba-tiba disusul dengan proyek dermaga apung dilokasi yang sama," tegasnya. Sementara sorotan lainnya datang dari sejumlah warga Tahuna. Mereka meragukan ketahanan dermaga apung tersebut ketika diterjang ombak angin barat yang sejak dulu dikenal kerab merusak bibir pantai teluk Tahuna. "Sebagai orang awam, kami ragu fisik jeti mini akan bertahan ketika ombak angin barat menerjang teluk Tahuna, sebab baru ombak kapal yang lewat saja suara gesekan dari sambungan jeti sudah begitu kuat terdengar, apalagi ketika ombak barat," ungkap beberapa warga yang kerab memancing dilokasi jeti. Jeti apung yang selesai dibangun pada tahun 2016 tersebut saat ini telah rusak dan tidak ada manfaatnya bagi masyarakat.

Metode pengukuran kinerja yang dipakai tidak dapat menggunakan hanya satu metode. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran yang berbeda untuk setiap tujuan. Salah satu ukuran kinerja yang dapat digunakan pemerintah adalah dengan menggunakan metode *Value for Money*. *Value for Money* adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan 3 komponen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomis adalah perolehan sumber daya (*input*) tertentu dengan harga yang rendah. Ekonomi terkait sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dari sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya (*input*) yang digunakan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya dengan percuma. Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Jika ekonomis berfokus pada *input* dan efisiensi pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Dengan demikian, suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe bertugas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang keuangan dan pendapatan daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe harus mempertanggungjawabkan dana yang dikelola secara transparan dan akuntabel yang salah satunya dapat diukur dengan menggunakan metode *Value for Money*. Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin melakukan penelitian tentang "**Analisis Value for Money pada Kinerja Program Kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe**".

## 1.1 Akuntansi

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah seni, ilmu (*science*), maupun perekayasaan (*technology*). Namun ada pula definisi lain akuntansi yaitu sebagai suatu proses. Akuntansi memiliki peran penting dalam suatu entitas karena akuntansi dapat menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan suatu entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas tersebut pada

tanggal tertentu. Secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan keuangan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Tidak hanya itu, akuntansi juga dapat diartikan sebagai seperangkat yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan tertentu dengan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi (Surwadjono, 2015).

## 1.2 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik adalah sebuah proses untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis serta membuat laporan transaksi keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkannya untuk digunakan saat pengambilan sebuah keputusan. Jika dilihat lebih dekat, maka akuntansi sektor publik memainkan peran penting dan menjadi topik perdebatan di kalangan praktisi dan akademisi. Penekanan pada upaya memajukan sektor publik yang selama ini dinilai masih kurang efisien dan menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien menjadi fokus perhatian pembahasan publik. Namun, belakangan ini sudah ada fokus yang lebih besar di kalangan praktisi, khususnya pemerintah, dalam mengevaluasi kelayakan praktik manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan dan pengembangan keuangan, sistem pemantauan dan audit, dan berbagai implikasi keuangan dari kebijakan pemerintah (Jamaluddin, 2019).

## 1.3 Pengukuran Kinerja

Kinerja adalah keberhasilan personel, tim atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan (Riadi 2020). Dalam perkembangannya, kinerja (*performance*) diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau *degree of accomplishment*. Dalam konteks ini, kinerja harus dapat menggambarkan hasil yang diraih, bukan sekedar cara kerja, proses, kemampuan, maupun perilaku individu (Andi 2022).

Pengukuran kinerja adalah proses pengukuran (*assessment*) kemajuan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk informasi mengenai efisiensi atas output yang dihasilkan, kualitas output, termasuk kualitas layanan yang diberikan, dan hasil-hasil aktivitas program. Pengukuran kinerja juga diartikan sebagai cara pemerintah untuk menentukan apakah mereka telah menghasilkan produk yang berkualitas dengan biaya yang masuk akal.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengukur kinerja organisasi, termasuk pengukuran atas Produktivitas, Efektivitas, Kualitas dan Ketepatan waktu (Andi 2022). Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah proses mengevaluasi kemajuan suatu pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi: penggunaan sumber daya yang efisien dalam produksi barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (betapa baiknya barang dan jasa diberikan kepada pelanggan dan sejauh mana pelanggan puas); hasil proses dibandingkan dengan tujuan yang dimaksudkan; efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Mahsun 2015). Menurut Riadi (2020) terdapat beberapa indikator dalam pengukuran kinerja, yaitu sebagai berikut:

1. Indikator kinerja *input* (masukan), yaitu indikator yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan, misalnya dana, SDM, informasi, dan lain-lain.
2. Indikator kinerja *output* (keluaran), yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik.
3. Indikator kinerja *outcome* (hasil), yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya suatu program atau pelaksanaan kegiatan.
4. Indikator kinerja *benefit* (manfaat), yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator kinerja *impact* (dampak), yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

#### 1.4 Value For Money

Konsep *Value for Money* berbeda secara signifikan dari konsep akuntansi dan manajemen keuangan *Time Value for Money*. *Value for money* adalah apresiasi terhadap nilai uang, sedangkan *Time Value of Money* adalah kesadaran bahwa nilai uang dapat berubah seiring dengan perubahan waktu. Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebaik-baiknya (Mahmudi, 2015).

*Value for Money* adalah konsep pengukuran kinerja sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas :

- 1) Perolehan *input* berkualitas tinggi dan kuantitas dengan harga rendah disebut sebagai ekonomi. *Input* primer berupa sumber daya keuangan (uang/tunai) diubah menjadi *input* sekunder seperti tenaga kerja, material, infrastruktur, dan barang modal, yang dikonsumsi untuk kegiatan operasional organisasi. Sejauh mana organisasi sektor publik dapat mengurangi jumlah sumber daya input yang diperlukan untuk menghindari pengeluaran yang boros dan tidak efektif disebut sebagai ekonomi.
- 2) Efisiensi adalah metode untuk mencapai hasil maksimal dengan menggunakan sumber daya sesedikit mungkin. Mengurangi jumlah sumber daya berlebihan yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu adalah tentang efisiensi. Untuk mencapai *output* yang diinginkan, efisiensi juga berarti mengurangi pemborosan sumber daya *input* seperti bahan fisik, energi, dan waktu.
- 3) Efektivitas mengacu pada sejauh mana hasil program memenuhi tujuan yang telah ditentukan. Istilah "efektivitas" mengacu pada perbandingan antara keluaran dan hasil. Semakin banyak *output* yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan, semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan tersebut. Jika ekonomi berkaitan dengan *input* dan efisiensi dengan *output* atau proses, efektivitas berkaitan dengan hasil.

Tiga elemen yang tercantum di atas adalah aspek terpenting dari *Value for Money*. Namun, beberapa orang percaya bahwa ketiga persyaratan itu tidak cukup. Ada dua unsur lain yang harus disertakan, yaitu keadilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*equality*). Keadilan mengacu pada ketersediaan kemungkinan sosial yang adil untuk memperoleh layanan publik berkualitas tinggi dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan, diperlukan pemerataan. Hal ini menunjukkan bahwa dana masyarakat tidak boleh terkonsentrasi pada segelintir tangan, tetapi harus didistribusikan secara merata.

Tujuan menggunakan *Value for Money* adalah untuk menghemat uang melalui pengadaan dan alokasi sumber daya yang cermat. Efisiensi mengacu pada seberapa baik sumber daya digunakan. Efektivitas diartikan sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

## METODE PENELITIAN

### 2.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif deskriptif dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah proses pengumpulan data deskriptif dari orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang subjek penelitian. Penelitian ini akan mengukur kinerja program kegiatan yang dilaksanakan dengan mengumpulkan dan menyajikan data Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan program kegiatan yang bersumber dari APBD tahun 2021 di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe jika dilihat atau dinilai menggunakan metode analisis *Value for Money*.

### 2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang beralamat di JL Malahasa No. 1, Kelurahan Soataloara II, Kec. Tahuna, 95813. Waktu penelitian selama bulan Juni 2021 sampai dengan selesai.

### 2.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, dimana peneliti menggunakan data Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan program kegiatan tahun 2021 di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Dimana peneliti melakukan observasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan mengumpulkan dokumen berupa data Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan program kegiatan yang bersumber dari APBD Kab. Kepl. Sangihe pada tahun 2021.

## 2.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung untuk mengetahui kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- 2) Dokumentasi, yaitu Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan capaian kinerja atau realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun anggaran 2021.

## 2.5 Metode dan Proses Analisa Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan suatu keadaan atau situasi pada objek penelitian dengan mengumpulkan data yang sudah ada kemudian menganalisis data tersebut menggunakan metode *Value for Money*. Proses analisis data dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan, yaitu;

1. Melakukan observasi data mengenai kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian berupa gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan program kegiatan tahun 2021 di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3. Menganalisis kinerja program kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggunakan metode *Value for Money* yang diukur dengan rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Adapun rumus yang digunakan yaitu;
  - a. Rasio Ekonomi =  $\frac{Input}{Nilai Input} \times 100\%$
  - b. Rasio Efisien =  $\frac{Output}{Input} \times 100\%$
  - c. Rasio Efektivitas =  $\frac{Outcome}{Output} \times 100\%$
4. Membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta memberikan saran bagi kemajuan dan perkembangan kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Hasil Penelitian

#### 3.1.1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

Penyusunan LAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2021 didasarkan pada: Indikator kinerja yang ditetapkan dalam ketentuan Kontrak Kinerja 2021 sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Pencapaian dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021. Untuk mencapai tujuan dari indikator target yang ada, perlu program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan dan indikator sasaran. Berikut ini adalah laporan pencapaian fisik dan keuangan berdasarkan APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengetahui hasil evaluasi kinerja setiap kegiatan pada tahun 2021.

**Tabel 3.1**  
**Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2021**

No	Program	Fisik			Keuangan		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	90	85	94	22,914,354,670	17,885.929,653	78
2.	Progam pengelolaan keuangan daerah	100	95	95	182,327,751,072	161,794,098,415	88
3.	Program pengelolaan barang milik daerah	100	100	100	786,594,420	782,929,900	99
4.	Program pengelolaan pendapatan daerah	100	100	100	657,225,000	623,997,738	94
<b>JUMLAH</b>				<b>98</b>	<b>206.685.925.162</b>	<b>181,086,955,706</b>	<b>90</b>

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Kepl. Sangihe*

### 3.2 Pembahasan

Pengukuran Kinerja Program Kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggunakan analisis *Value for Money* yang diukur dengan rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas, dengan penjelasan sebagai berikut:

#### 3.2.1 Rasio Ekonomi

Ekonomi memiliki arti dimana dalam pengadaan sumber daya, lebih baik menetapkan harga yang lebih rendah atau harga yang mendekati harga pasar. Jika realisasi anggaran lebih kecil dari pada target anggaran maka kinerja suatu organisasi tersebut dapat dikatakan ekonomis. Semakin besar rasio ekonomi yang dapat diprediksi oleh pemerintah tentang biaya pengeluaran, semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengukuran tingkat ekonomi dalam penelitian ini berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Nilai Input}} \times 100\%$$

Ketentuan:

- 1) Jika diperoleh nilai rasio kurang dari 100%, maka Ekonomis
- 2) Jika diperoleh nilai rasio sama dengan 100%, maka Ekonomis Berimbang
- 3) Jika diperoleh nilai rasio lebih dari 100, maka Tidak Ekonomis

**Tabel 3.2**

**Pengukuran Tingkat Ekonomi Program Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021**

<b>Program</b>	<b>Nilai Input (Rp)</b>	<b>Input (Rp)</b>	<b>Rasio Ekonomi (%)</b>
Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	22,914,354,670	17,885.929,653	78
Program pengelolaan keuangan daerah	182,327,751,072	161,794,098,415	88
Program pengelolaan barang milik daerah	786,594,420	782,929,900	99
Program pengelolaan pendapatan daerah	657,225,000	623,997,738	94
<b>JUMLAH</b>	<b>206.685.925.162</b>	<b>181,086,955,706</b>	<b>90</b>

*Sumber: Data Olahan, 2022.*

Berdasarkan tabel 3.2 hasil pengukuran rasio ekonomi maka diketahui terdapat 4 program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya, berdasarkan kriteria ekonomi menurut Mahsun (2016) menegaskan bahwa pengukuran ekonomi dikategorikan kedalam 3 kategori. Jika diperoleh hasil pengukuran ekonomi dibawah 100% kinerja tersebut dikatakan telah ekonomis sedangkan jika diperoleh sama dengan 100% maka dikatakan bahwa kinerja kegiatan tersebut ekonomis berimbang, dan terakhir jika diperoleh diatas dari 100% maka dapat dikatakan bahwa kinerja tersebut tidak ekonomis. Dengan demikian berdasarkan hasil data olahan pada tabel 3.2 bahwa 4 program kegiatan yang dilaksanakan mendapatkan jumlah nilai keseluruhan kurang dari 100% dimana hal ini termasuk dalam kategori ekonomis yang artinya Badan Pengelolaa Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mampu melakukan penghematan pada setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan.\

### 3.2.2 Rasio Efisiensi

Efisiensi adalah penggunaan atau pemanfaatan *input* tertentu untuk mencapai hasil yang maksimum dalam proses pelaksanaan suatu program kerja. Efisiensi diukur dengan membandingkan *output* yang dihasilkan dengan *input* yang digunakan. Proses operasional menjadi efisien ketika produk atau tugas tertentu dapat dicapai dengan sumber daya dan sarana yang minimal. Efisiensi adalah perbandingan antara realisasi biaya dengan realisasi pendapatan. Semakin kecil nilai efisiensinya, semakin baik. Pengukuran tingkat efisiensi dalam penelitian ini berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efisien} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Ketentuan:

- 1) Jika diperoleh nilai rasio kurang dari 100%, Tidak Efisien
- 2) Jika diperoleh nilai rasio sama dengan 100%, maka Efisien Berimbang
- 3) Jika diperoleh nilai rasio lebih dari 100, maka Efisien

**Tabel 3.3**

**Pengukuran Tingkat Efisiensi Program Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021**

Program	Input (%)	Output (%)	Rasio Efisien (%)
Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	78	94	<b>121</b>
Program pengelolaan keuangan daerah	88	95	<b>108</b>
Program pengelolaan barang milik daerah	99	100	<b>102</b>
Program pengelolaan pendapatan daerah	94	100	<b>107</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>90</b>	<b>98</b>	<b>109</b>

*Sumber: Data Olahan, 2022.*

Berdasarkan tabel 3.3 hasil pengukuran rasio efisiensi maka diketahui terdapat 4 program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya, berdasarkan kriteria efisiensi menurut Mahsun (2016) menegaskan bahwa pengukuran efisiensi dikategorikan kedalam 3 kategori yaitu jika nilai yang diperoleh lebih dari 100% maka kinerja kegiatan tersebut dapat dikatakan efisien, jika nilai yang diperoleh sama dengan 100% maka kinerja kegiatan tersebut dikatakan efisien berimbang, dan jika nilai yang diperoleh kurang dari 100% maka kinerja kegiatan tersebut dikatakan tidak efisien. Berdasarkan hasil data olahan pada tabel 3.3 bahwa 4 program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2021 seluruhnya mendapatkan nilai lebih dari 100% yang artinya program tersebut telah berjalan dengan efisien.

### 3.2.3 Rasio Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran yang menggambarkan berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam pencapaian tujuan program. Semakin besar *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Istilah "efektivitas" tidak menentukan berapa biaya untuk mencapai tujuan. Efektivitas juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuannya. Ketika sebuah perusahaan atau organisasi mencapai tujuannya, dikatakan beroperasi dengan sukses. Semakin tinggi nilai tarif efektif, semakin baik. Pengukuran tingkat efektivitas dalam penelitian ini berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Ketentuan:

- 1) Jika diperoleh nilai rasio kurang dari 100%, Tidak Efektif
- 2) Jika diperoleh nilai rasio sama dengan 100%, maka Efektivitas Berimbang
- 3) Jika diperoleh nilai rasio lebih dari 100, maka Efektif

**Tabel 3.4**



**Pengukuran Tingkat Efektivitas Program Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021**

<b>Program</b>	<b>Outcome (%)</b>	<b>Output (%)</b>	<b>Rasio Efektivitas (%)</b>
Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	<b>100</b>	94	<b>106</b>
Program pengelolaan keuangan daerah	<b>100</b>	95	<b>105</b>
Program pengelolaan barang milik daerah	<b>100</b>	100	<b>100</b>
Program pengelolaan pendapatan daerah	<b>100</b>	100	<b>100</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>102</b>

*Sumber: Data Olahan, 2022.*

Berdasarkan tabel 3.4 hasil pengukuran rasio efektivitas maka diketahui terdapat 4 program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya, berdasarkan kriteria efektivitas menurut Mahsun (2016) jika diperoleh nilai rasio efektivitas lebih dari 100%, maka kinerja kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif. Jika diperoleh nilai rasio efektivitas sama dengan 100%, maka kinerja kegiatan tersebut dikatakan efektif berimbang. Dan jika diperoleh nilai rasio efektivitas kurang dari 100%, maka kinerja kegiatan tersebut dikatakan tidak efektif. Dengan demikian berdasarkan hasil pada tabel 3.4 maka diperoleh hasil bahwa kinerja dari semua program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 2021 telah berjalan dengan efektif. Dengan kata lain bahwa setiap program kegiatan berhasil mencapai tujuan yang diharapkan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dimana dari segi rasio ekonomi kinerja program kegiatan yang dilaksanakan telah ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mampu mengelola anggaran secara tepat dan dapat meminimalisir penggunaan anggaran yang berlebih sehingga terjadi penghematan. Selanjutnya, berdasarkan hasil rasio efisiensi kinerja program kegiatan yang telah dilaksanakan telah efisien. Hal ini menunjukkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mampu mengelola sumber daya dengan baik yakni menggunakan *input* dengan serendah-rendahnya untuk menghasilkan *output* yang besar. Dan untuk rasio efektivitas kinerja program kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan dengan efektif. Dengan kata lain, setiap program kegiatan yang sudah dilaksanakan telah berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan kesimpulan bahwa pengukuran kinerja pada program kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 2021 apabila diukur dengan menggunakan analisis *Value for Money* dapat dikatakan baik atau sudah memenuhi syarat nilai *Value for Money* yaitu ekonomis, efisien, efektif.

### **Saran**

Diharapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap mempertahankan kinerja yang baik untuk tahun-tahun berikutnya sehingga meningkatkan nilai ekonomi, efisiensi dan efektivitas pada setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan dan mampu mencapai tujuan serta sasaran yang tepat.

### **Daftar Pustaka**

- Andi Hartati, 2022. Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Teori dan Aplikasi. Media Sains Indonesia.
- Jamaluddin Majid. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Sulawesi Selatan: Pusaka Almaila.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi 3, Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, Moh, Firma Sulistiwaty, dan Andre Purwanugraha. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPEE Yogyakarta.
- Riadi, M. 2020. *Tujuan , Syarat , Indikator , Model dan Proses*. KajianPustaka, 1–12.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulastiningsih., Ida Sulistyowati. 2015. *Pengukuran Kinerja Berbasis Value For Money Studi Pada Smp Negeri 2 Banjarnegara*. Stie Widya Wiwaha Yogyakarta. Jurnal Kajian Bisnis Vol. 23, No. 1, 2015, 1 – 13.
- Suwardjono. 2015. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPEE-Yogyakarta.